



LAPORAN KEUANGAN

**BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Gubernur selaku pemegang kuasa pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya. Disamping itu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022, telah berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Padang, Desember 2024

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP. MPA

Pembina Tk. I

NIP. 19810920 199912 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1. Informasi Umum

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu biro dari sembilan biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkedudukan di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dibidang pengadaan barang dan jasa lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai unsur staf dibidang pengadaan barang milik daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Daerah mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah terkait pengadaan barang dan jasa, serta penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pelaporan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, dan serta penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu, Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa, Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, dan 9 (sembilan) Sub Bagian, serta kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat paragraf 3 pasal 68, ditetapkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok "*membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.*".

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2023 telah ditetapkan visi, misi, dan

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016-2023 menjadi Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2024. Visi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”.

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan spiritual.

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersediannya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpeliharaan dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Sedangkan Misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, misi pembangunan daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah misi kedua, yaitu Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Kaitannya terletak pada pengelolaan aset yang tertib dan benar akan menghasilkan data aset milik Pemerintah Prov. Sumatera Barat yang akurat dan dapat dibuktikan keberadaannya. Tentunya hal ini menjadi salah satu indikasi tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional
- d. Catatan atas Laporan Keuangan
- e. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta hasil-hasil yang telah dicapai
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan sumber penerimaannya
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

- 5.3.1. Pendapatan LO
- 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan
dan
Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Ekonomi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan dan harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif dengan tujuan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan dan ditetapkan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat antara lain adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, yang akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam program-program kegiatan pembangunan di SKPD Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai implikasi dari sistem pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel, yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan adalah membangun suatu sistem akuntabilitas dan kinerja Pemerintah guna mewujudkan *Good Governance* dan terciptanya pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan baik.

Sebagai salah satu unit kerja lingkup SKPD Setda Prov. Sumbar, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, bertanggung jawab dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan antara lain tersedianya pengelolaan asset daerah sesuai kebutuhan, terwujudnya pengelolaan asset daerah yang tertib dan mewujudkan keterpaduan pengelolaan asset pemerintah daerah.

Visi sebagai gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Setda Prov. Sumbar, adalah :

“ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa ”

Misi yang akan diemban dalam upaya perwujudan visi sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya realisasi dan Akuntabilitas paket Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Dokumen Perencanaan;
2. Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ;
3. Meningkatnya tingkat Kematangan UKPBJ;

2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai visi dan misi organisasi serta berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (beserta bahannya) maka pada Tahun 2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Setda Prov. Sumbar sebanyak 2 program dan 11 kegiatan serta 33 sub kegiatan.

Kebijakan keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2024 meliputi hal berikut :

2.1. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran/belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang.

Program dan kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, didukung oleh dana yang bersumber dari APBD. Melalui dana APBD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp2.428.567.398,00** yang dialokasikan untuk masing-masing program sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,131,480,811.00
2	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1,297,086,587.00
	Total	2,428,567,398.00

2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2024, ditempuh dengan pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

3. Indikator Pencapaian Kinerja APBD

Dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2024 yang dialokasikan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, pencapaian target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Program /Kegiatan	Indikator Pencapaian Hasil
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
1. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	
1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Terlaksananya dokumen penyusunan penganggaran (Murni dan Perubahan) serta dokumen perencanaan (Renja,Renstra)
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Terlaksananya dokumen DPA Tahun 2024

DPA-SKPD	
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Fisik dan Laporan Keuangan Biro, Penyusunan Laporan fisik pelaksanaan sub kegiatan serta penyusunan Laporan Kinerja Biro
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Peyusunan Evaluasi Kinerja Biro (LAKIP, SAKIP, Laporan Tahunan, LKPJ, LKPD)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	
1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD
KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	
1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3 unit Kendaraan Roda 4
2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan BMD dan Tersedianya Laporan BMD
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya peningkatan wawasan SDM melalui keikutsertaan ASN dalam Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor berupa lemari besi dan locker
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga berupa belanja modal alat pendingin (AC) dan belanja modal alat studio (sound system)

3. Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya logistik kantor untuk 1 tahun
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan Map dan barang cetakan penggandaan OPD untuk 1 tahun
5. Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya kebutuhan tamu untuk 1 tahun
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah serta terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah
7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
1. Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan meja dan kursi tamu serta lemari kayu minimalis
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya berupa Laptop, PC unit dan printer
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat selama 12 bulan
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Honorarium dan BPJS Non ASN untuk 12 bulan
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas
2. Pemeliharaan Mebel	Tersedianya jasa pemeliharaan mebel

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya jasa pemeliharaan perbaikan peralatan dan mesin lainnya
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
1. Pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya pembahasan finalisasi dokumen RUP TA 2024 dan tersusunnya RUP final TA 2024, Pembahasan Dokumen RUP tahun anggaran 2024 dan RUP final tahun 2024
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa melalui E-Purchasing, pejabat pengadaan dan kelompok kerja pemilihan
3. Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa OPD Provinsi dan Kab/Kota
KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	
1. Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Terfasilitasinya pemanfaatan Aplikasi SPSE kab/kota dan OPD Provinsi serta terpeliharanya server dan jaringan aplikasi SPSE dan tersediannya Colocation Server dan Jaringan Aplikasi SPSE
2. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terfasilitasinya pemanfaatan Aplikasi penunjang pengadaan barang dan jasa bagi kab/kota dan OPD Provinsi serta pengembangan aplikasi penunjang pengadaan barang dan jasa
3. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Laporan IKM terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa informasi pengadaan barang dan jasa
KEGIATAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	
1. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Dan Jasa	Terlaksananya Bimbingan teknis pengadaan Barang dan jasa, pelaksanaan sidang kode etik, Pengiriman personil UKPBJ, penilaian angka kredit dan peningkatan kompetensi KPA/PPK
2. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan	Terlaksananya Pembinaan tingkat

Barang dan Jasa	kematangan UKPBJ dan terlaksananya rapat koordinasi kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya bimbingan teknis PBJ, bantuan terkait Pengadaan barang dan jasa, Pendampingan paket strategis, tersedianya klinik pengadaan dan terselasaikannya sengketa kontrak

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Total realisasi belanja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2.304,123,940.00 - . Jumlah tersebut mencapai 94,88% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.428,567,398.00,- dengan rincian sebagai berikut:

Nama Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	88,800,000.00	88,800,000.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	2,150,148,128.00	2,039,174,305.00	94.84
Belanja Modal	189,619,270.00	176,149,635.00	92.90
Jumlah	2,428,567,398.00	2,304,123,940.00	94.88

Pada Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.88,800,000,- atau 100%. Belanja Barang dan Jasa, dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2,150,148,128,- terealisasi sebesar Rp 2,039,174,305,- atau sebesar 94,84%. Sedangkan pada Belanja Modal, dari yang dianggarkan sebesar Rp. 189,619,270,- terealisasi sebesar Rp. 176,149,635,- atau sebesar 98,97%.

2. Pendapatan

Selama tahun anggaran 2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak menerima pendapatan dari jenis manapun.

3. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
	BELANJA	2.428.567.398,00	2.304.123.940,00	94,88	124.443.458,00
I	BELANJA OPERASI	2.238.948.128,00	2.127.974.305,00	95,04	110.973.823,00
1	Belanja Pegawai	88.800.000,00	88.800.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.150.148.128,00	2.039.174.305,00	94,84	110.973.823,00
II	BELANJA MODAL	189.619.270,00	176.149.635,00	92,90	13.469.635,00
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	189.619.270,00	176.149.635,00	92,90	13.469.635,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Seluruh realisasi sampai akhir Desember 2024 dari total anggaran Rp. 2,428,567,398.00,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2,304,123,940.00,- (94,88%).

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi	
					Fisik	Keuangan
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36,240,000.00	35,243,886.00	100,00	97.25
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam kegiatan ini dianggarkan untuk penyusunan penganggaran (RKA, DPA murni dan DPA Perubahan) dan penyusunan dokumen perencanaan (Renja dan Renstra) serta Rapat koordinasi perencanaan dengan UKPBJ Kab/Kota menghasilkan 3 dokumen dalam 1 tahun telah terpenuhi menghabiskan 100% dari anggaran.				
		Kegiatan ini dianggarkan untuk Penyusunan Dokumen DPA Pergeseran, dan Perubahan Tahun Anggaran 2023 menghasilkan 3 Dokumen terpenuhi dengan menghabiskan 97,83% dari anggaran.				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,586,000.00	3,966,550.00	100,00	71.01
		Dalam kegiatan ini dianggarkan untuk pembelian bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak dan bahan computer untuk kebutuhan dalam penyusunan Dokumen Laporan realisasi dan laporan keuangan 2024 menghasilkan 1 Dokumen terpenuhi dengan menghabiskan 71.01 % dari anggaran.				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,346,000.00	17,987,266.00	100,00	98.04
		Dalam kegiatan ini dianggarkan pembayaran atas pembelian bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, kertas dan Cover, bahan cetak dan bahan komputer kebutuhan Biro dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan sampai akhir tahun anggaran semua kebutuhan telah terpenuhi dengan menghabiskan 94,22% dari anggaran.				
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122,357,500.00	114,066,229.00	100,00	93.22
		Dalam kegiatan ini dianggarkan Belanja Pegawai berupa honorarium pengelola keuangan seperti KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dalam rangka penatausahaan keuangan Biro. Kegiatan ini terealisasi sebesar 93.22 %.				

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13,814,000.00	11,663,300.00	100,00	84.43
		Dalam kegiatan ini dianggarkan pembayaran atas pembelian bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, kertas dan Cover, bahan cetak dan bahan komputer kebutuhan Biro terkait penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran hingga akhir tahun anggaran 2024, dana yang telah terealisasi untuk kegiatan ini adalah 84.43 %.				
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16,500,000.00	15,558,560.00	100,00	94.29
		kegiatan ini untuk menyediakan jaminan asset Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari resiko kerugian dengan mengasuransikan Barang Milik Daerah berupa 3 unit kendaraan dinas roda 4. Terhitung mulai dari Bulan April 2024 sampai dengan April 2025.				
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4,000,000.00	4,000,000.00	100,00	100.00
		Dalam kegiatan ini dianggarkan untuk pembayaran atas pembelian bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak dan bahan computer untuk kebutuhan biro dalam penyusunan laporan BMD, telah terealisasi sebanyak anggaran.				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11,383,000.00	1,866,750.00	100,00	16.40
		Dalam kegiatan ini dianggarkan untuk pembayaran atas pembelian bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak dan bahan computer dan Perjalanan dinas untuk kebutuhan biro dalam penyusunan laporan BMD, terealisasi sebanyak 16.40 % dari anggaran.				
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000.00	10,000,000.00	100,00	50.00
		Awalnya kegiatan ini dianggarkan untuk menghadiri Bimbingan Teknis/Diklat yang datang dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai dengan kegiatan Bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa namun pada anggaran perubahan dana di alihkan ke rapat koordinasi sehingga sisa anggaran 10.000.000 telah terealisasi 50% dari anggaran.				
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49,826,200.00	47,800,000.00	100,00	95.93
		Dalam kegiatan ini dianggarkan untuk pembayaran atas pembelian kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor seperti lemari besi dan Locker, telah terealisasi sebanyak 95.93 % dari anggaran.				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21,000,000.00	20,300,000.00	100,00	96.67
		Dalam kegiatan ini dianggarkan belanja modal peralatan dan mesin alat studio dan alat pendingin, telah terealisasi sebanyak 96.67 % dari anggaran				

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,446,400.00	12,446,400.00	100,00	100,00
	Dalam kegiatan ini dianggarkan pembayaran atas penyediaan barang cetakan kebutuhan Biro dan sampai akhir tahun dan telah terpenuhi 100 % dari anggaran				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31,822,600.00	31,822,600.00	100,00	100,00
	Penyediaan makanan dan minuman dilaksanakan berdasarkan keperluan rapat rutin Biro dan tamu yang harus disediakan makanan dan minumannya, dan kebutuhan logistic lainnya. Telah terpenuhi sampai akhir tahun dengan menghabiskan 100 % dari anggaran				
	Fasilitas Kunjungan Tamu	3,020,000.00	3,020,000.00	100,00	100,00
	Penyediaan makanan dan minuman dilaksanakan berdasarkan keperluan rapat rutin Biro dan tamu yang harus disediakan makanan dan minumannya, dan kebutuhan logistic lainnya. Telah terpenuhi sampai akhir tahun dengan menghabiskan 100 % dari anggaran				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	402,927,357	401,245,952	100,00	99.58
	Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan kepada : <i>pertama</i> : adanya undangan yang disampaikan untuk menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi baik itu di dalam dan luar daerah yang diikuti oleh personil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, <i>kedua</i> : kegiatan ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan di dalam dan luar provinsi atas suatu kondisi / permasalahan yang harus diselesaikan/ ditegaskan dan <i>ketiga</i> : dalam rangka monitoring evaluasi dan pengambilan data atas kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Hingga akhir tahun anggaran 2023, dana yang telah terealisasi untuk kegiatan ini adalah 98,41%.				
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	604,500.00	604,500.00	100,00	100,00
	Dalam kegiatan ini dianggarkan pembayaran atas pembelian bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis berupa kertas dan Cover. Telah terealisasi sebanyak 100% anggaran				
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Mebel	24,769,200	24,660,000	100,00	99.56
	Kegiatan ini telah terlaksana dengan direalisasinya Belanja Modal Pengadaan Mebel yang terdiri dari kursi kerja dan meja kerja. Realisasi fisik 100,00 dan keuangan untuk kegiatan ini adalah 99,56%.				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61,032,600	54,750,000	100,00	89.71
	Kegiatan ini telah terlaksana dengan direalisasinya Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin yang terdiri dari Tablet dan Printer. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah 89,71%.				

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

7	Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,264,000	2,248,000	100,00	99.29
		Dalam kegiatan ini dianggarkan untuk pembelian bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, kertas dan Cover, benda pos berupa materai serta bahan komputer untuk kebutuhan Biro terkait dengan tersedianya jasa surat menyurat.				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	9,150,000	9,150,000	100,00	100.00
		Dalam kegiatan ini dianggarkan Belanja jasa pemeliharaan alat rumah tangga (AC) Kegiatan ini terealisasi sebesar 100,00%.				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118,088,902	117,451,457	100,00	99.46
		Dalam kegiatan ini dianggarkan Belanja Non ASN atau Pegawai kontrak berupa jasa Sopir . Kegiatan ini terealisasi sebesar 99,46 %.				
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,900,000	12,900,000	100,00	100
		Dalam kegiatan ini dianggarkan untuk pembayaran atas pemeliharaan peralatan kantor seperti computer, laptop, AC, printer dan Scanner selama 1 tahun dan telah menghabiskan 100,00% dari anggaran.				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132,402,552	112,034,900	100,00	84.62
		Realisasi atas kegiatan ini berdasarkan kebutuhan untuk pemeliharaan, penggantian suku cadang, pembayaran pajak kendaraan serta BBM kendaraan dinas/operasional Biro dengan menghabiskan 84,62 % anggaran.				
		Pemeliharaan mebel	1,000,000	1,000,000	100,00	100.00
		Realisasi atas kegiatan ini berdasarkan kebutuhan untuk pemeliharaan mebel, telah terealisasikan 100% dari anggaran				
ii.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	76,289,300	64,461,390	100,00	84.50
9	Pengelolaan					

	Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan ini diadakan agar terlaksananya strategi perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, salah satunya Pembahasan finalisasi dokumen RUP TA 2024 serta penyusunan RUP final TA 2024. Pada tahun 2024 kegiatan ini terealisasi 84,50 %.				
		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	246,119,622	245,198,248	100,00	99.63
		Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengakomodir proses pengadaan barang/jasa untuk OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Target yang direncanakan untuk 2024 adalah terlaksananya proses pengadaan barang/jasa menyerap anggaran kegiatan 99,63 %.				
		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	101,144,639	101,116,608	100,00	99.97
10	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kegiatan ini dilaksanakan untuk Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PBJ Kab/Kota Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PBJ OPD Provinsi. Realisasi Keuangan untuk kegiatan ini adalah sebesar 99,97 %.				
		Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	298,632,639	297,988,340	100,00	99.78
		Kegiatan ini bertujuan untuk Fasilitasi Pemanfaatan Aplikasi SPSE kepada OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Fasilitasi Pemanfaatan Aplikasi SPSE pada Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Standarisasi SPSE Pemeliharaan Server dan Jaringan Aplikasi SPSE Pengelolaan Aplikasi SPSE Tersedianya Colocation Server dan Jaringan Aplikasi SPSE, dengan realisasi keuangan 99,78 %.				
		Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	162,578,726	147,742,587.00	100,00	90.87
		Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi Pemanfaatan Aplikasi Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa kepada OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Fasilitasi Pemanfaatan Aplikasi Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten/Kota Pengembangan Aplikasi Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah 90,87 %.				
		Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	60,748,776	59,762,842	100,00	98.38
11	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan ini bertujuan memberikan laporan IKM terhadap Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Laporan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				
		Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	97,361,521	92,088,170	100,00	94.58
		Kegiatan ini bertujuan Pelaksanaan Sidang Kode Etik, Pelatihan Kantor Sendiri, Penilaian Angka Kredit serta Sertifikasi Kompetensi PPBJ/PPK selama tahun 2024, kegiatan ini telah terealisasi sebesar 94,58 % dari anggaran				

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	104,990,000	102,557,341	100,00	97.68
	Kegiatan ini dianggatkan untuk Pembinaan Tingkat Kematangan UKPBJ serta Rapat Koordinasi Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa selama tahun 2023 kegiatan ini telah terealisasi sebesar 97,68 % dari anggaran.				
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	149,221,364	127,422,064	100,00	85.39
	Pendampingan dan Bantuan Hukum terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Pendampingan Paket Strategis, Penyediaan Klinik Pengadaan Penyelesaian Sengketa Kontrak, Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan ini diadakan dalam rangka melatih anggota Pokja/Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota, serta PA/KPA Kegiatan pada masing-masing OPD Lingkup Pemprov Sumatera Barat. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah 85,39 %.				
	JUMLAH	2,428,567,398.00	2,304,123,940.00	100,00	94.88

4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara umum tidak terdapat kendala yang begitu berarti bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam merealisasikan 29 sub kegiatan yang ada pada DPA 2024. sisa anggaran sebesar Rp. 124.443.458,- berupa sisa dari anggaran Honorarium Narasumber, Makan minum rapat, Perjalanan Dinas dan BBM yang tidak dapat dicairkan karena tidak adanya kegiatan diakhir Desember 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu entitas pengguna anggaran, sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku PPKD.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis aktual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan

(saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Kontruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

l. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan, dan jika nilai perolehannya tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Meskipun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya umur/masa manfaat atas aset-aset tersebut dan metode penyusutan yang akan digunakan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

Untuk realisasi Tahun 2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak memiliki pendapatan dalam bentuk apapun, baik pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, ataupun lain-lain pendapatan asli daerah.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
a.	Belanja Operasi	2.238.948.128,00	2.127.974.305,00	95,04	2.219.337.044,00
-	Belanja Honorarium	88.800.000,00	88.800.000,00	100,00	63.840.000,00
-	Belanja Barang Pakai Habis	463.955.226,00	434.347.012,00	93,62	384.596.736,00
-	Belanja Jasa Kantor	412.336.894,00	393.652.193,00	95,47	463.785.032,00
-	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.402.008,00	23.823.124,00	93,78	26.733.772,00
-	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	11.500.000,00	8.500.000,00	73,91	123.300.000,00
-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	2.500.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	129.200.000,00	111.089.000,00	85,98	103.094.193,00
-	Belanja Perjalanan Dinas	1.087.754.000,00	1.057.762.976,00	97,24	1.051.487.311,00
	Jumlah	2.238.948.128,00	2.127.974.305,00	95,04	2.219.337.044,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024. Untuk realisasi Tahun 2024 mencapai 95,04 % dari anggarannya.

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa dalam tahun 2024 mencapai 94,84% dari yang dianggarkan.

Rincian dari masing-masing belanja adalah sebagai berikut :

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
1)	Belanja Honorarium	88.800.000,00	88.800.000,00	100,00	63.840.000,00
	Terdiri dari :				
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	88.800.000,00	88.800.000,00	100,00	63.840.000,00
	Jumlah	88.800.000,00	88.800.000,00	100,00	63.840.000,00
2)	Bahan Habis Pakai	463.955.226,00	434.347.012,00	93,62	384.596.736,00
	Terdiri dari :				
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	127.114.777,00	117.885.912,00	92,74	101.235.836,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.068.900,00	14.068.900,00	100,00	18.888.800,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	49.375.000,00	49.288.200,00	99,82	43.424.400,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.774.600,00	26.369.500,00	98,49	20.881.500,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.480.000,00	1.480.000,00	100,00	700.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	69.510.000,00	68.644.500,00	98,75	56.292.700,00
	Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	695.949,00	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-	8.465.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	171.916.000,00	153.590.000,00	89,34	134.708.500,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.020.000,00	3.020.000,00	100,00	-
	Jumlah	463.955.226,00	434.347.012,00	93,62	384.596.736,00
3)	Belanja Jasa Kantor	412.336.894,00	393.652.193,00	66,89	463.785.032,00
	Terdiri dari :				
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.600.000,00	16.550.000,00	50,77	27.200.000,00
	Honorarium Rohaniwan	800.000,00	400.000,00	50,00	500.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Caraka	-	-	-	35.393.762,00

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

	Belanja Jasa Tenaga Supir	109.186.894,00	109.186.893,00	100,00	133.347.620,00
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	65.000.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	198.000.000,00	198.000.000,00	100,00	198.000.000,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.750.000,00	4.515.300,00	66,89	4.343.650,00
	Jumlah	412.336.894,00	393.652.193,00	95,47	463.785.032,00
4)	Belanja luran Jaminan/Asuransi	25.402.008,00	23.823.124,00	93,78	26.733.772,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.048.488,00	3.510.368,00	86,71	4.936.455,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	805.032,00	805.032,00	100,00	375.174,00
	Belanja luran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN	4.048.488,00	3.949.164,00	97,55	6.252.843,00
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	16.500.000,00	15.558.560,00	94,29	15.169.300,00
	Jumlah	25.402.008,00	23.823.124,00	93,78	26.733.772,00
5)	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	11.500.000,00	8.500.000,00	73,91	123.300.000,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.500.000,00	8.500.000,00	73,91	2.500.000,00
	Belanja Sewa Hotel	-	-	-	120.800.000,00
	Jumlah	11.500.000,00	8.500.000,00	73,91	123.300.000,00
6)	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	2.500.000,00
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	2.500.000,00
	Jumlah	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	2.500.000,00
7)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	129.200.000,00	111.089.000,00	85,98	103.094.193,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	106.150.000,00	88.039.000,00	82,94	90.194.193,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000,00	9.150.000,00	100,00	-

	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.760.000,00	8.760.000,00	100,00	8.760.000,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.140.000,00	4.140.000,00	100,00	4.140.000,00
	Jumlah	129.200.000,00	111.089.000,00	85,98	103.094.193,00
8)	Belanja Perjalanan Dinas	1.087.754.000,00	1.057.762.976,00	97,24	1.051.487.311,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.087.754.000,00	1.057.762.976,00	97,24	1.051.487.311,00
	Jumlah	1.087.754.000,00	1.057.762.976,00	97,24	1.051.487.311,00

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189.619.270,00	176.149.635,00	92,90	217.433.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2024. Realisasi tahun 2024 mencapai 92,90% dari anggarannya.

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	86.595.400,00	84.360.000,00	97,42	123.144.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.462.710,00	15.539.635,00	94,39	381.147.000,00
Belanja Modal Komputer	86.561.160,00	76.250.000,00	88,09	94.289.000,00
Jumlah	189.619.270,00	176.149.635,00	92,90	217.433.000,00

Rincian masing-masing belanja modal adalah sebagai berikut :

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
1)	Belanja Modal Alat Kantor	49.826.200,00	47.800.000,00	95,93	34.700.000,00
	Terdiri dari :				
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	38.019.600,00	36.000.000,00	94,69	34.700.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.806.600,00	11.800.000,00	99,94	
2)	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	36.769.200,00	36.560.000,00	99,43	88.444.000,00
	Terdiri dari :				
	Belanja Modal Mebel	24.769.200,00	24.660.000,00	99,56	88.444.000,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	12.000.000,00	11.900.000,00	99,17	
3)	Belanja Modal Alat Studio	9.000.000,00	8.400.000,00	93,33	34.700.000,00
	Terdiri dari :				
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	9.000.000,00	8.400.000,00	93,33	34.700.000,00
4)	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.462.710,00	7.139.635,00	95,67	-
	Terdiri dari :				
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	7.462.710,00	7.139.635,00	95,67	-
5)	Belanja Modal Komputer Unit	64.961.160,00	56.500.000,00	86,98	88.469.000,00
	Terdiri dari :				
	Belanja Modal Personal Komputer	60.986.160,00	56.500.000,00	92,64	88.469.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.975.000,00		-	88.469.000,00
6)	Belanja Modal Peralatan Komputer	21.600.000,00	19.750.000,00	91,44	5.820.000,00
	Terdiri dari :				
	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	21.600.000,00	19.750.000,00	91,44	5.820.000,00

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah **Rp. 13.469.635,00** merupakan efisiensi dari penggunaan anggaran belanja modal, untuk rincian daftar belanja modal tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 21.

Sisa Beban (Jan – Maret 2024) = Rp. 15.558.560 - Rp. 11.668.920,-
 = Rp 3.889.640,-

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11.

Perkiraan	2024	2023
-----------	------	------

3. Persediaan **2.498.000,00** **4.750.600,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023, yaitu :

Persediaan Barang habis pakai, alat tulis kantor, kertas dan cover, serta bahan computer senilai Rp. 2.498.000,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Barang Pakai Habis	4.750.600,00	2.498.000,00	4.750.600,00	2.498.000,00

Penambahan adalah : sejumlah nilai belanja alat tulis kantor, bahan cetak , kertas dan cover serta bahan komputer selama tahun anggaran 2024

Pengurangan adalah : Jumlah nilai Alat Tulis Kantor bahan cetak , kertas dan cover serta bahan komputer yang telah dipergunakan untuk menunjang kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2024	2023
-----------	------	------

4. Peralatan dan Mesin **3.993.823.050,00** **3.325.056.835,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp.	127.062.425,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2024	Rp.	3.993.823.050,00

Daftar Peralatan dan Mesin Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	3.325.056.835,00	668.766.215,00	-	3.993.823.050,00
Akm Peny Peralatan & Mesin	(2.616.872.816,20)	-	825.749.329,87	(3.442.622.146,07)

Saldo Audited 2023	3.325.056.835,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2024	176.149.635,00
Mutasi Antar SKPD	0,00
Reklass	492.616.580,00
Total Mutasi Tambah	668.766.215,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
Reklasifikasi aset tidak bermanfaat	0,00
Mutasi Antar SKPD	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	668.766.215,00
Saldo per 31 Des 2024	3.993.823.050,00

Rekapitulasi daftar mutasi tambah dan kurang aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 17 dan 18.

Perkiraan	2024	2023
-----------	------	------

5. Akumulasi Penyusutan 3.442.622.146,07 2.616.872.816,20

Terdiri dari :

Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin (3.442.622.146,07) (2.616.872.816,20)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2024. Akumulasi Penyusutan ini merupakan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	2.616.872.816,20	-	825.749.329,87	3.442.622.146,07
Jumlah Akm Penyusutan	2.616.872.816,20	-	825.749.329,87	3.442.622.146,07

Uraian	Peralatan & Mesin
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2023 (NERACA)	2.616.872.816,20
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	0,00
o Mutasi antar SKPD	0,00
o Reklasifikasi Aset	492.616.580,00
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	0,00
o Mutasi antar SKPD	0,00
o Reklasifikasi Aset tidak bermanfaat	0,00
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2024	333.132.749,87
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2024	3.442.622.146,07

Penjelasan Koreksi tambah dan koreksi kurang Akumulasi Penyusutan :

Penjelasan Koreksi Tambah

- a) Koreksi tambah merupakan akumulasi penyusutan mutasi tambah berupa Peralatan dan Mesin.
- b) Terdapat Reklasifikasi aset senilai Rp. 492.616.580,00
- c) Beban Penyusutan pada Tahun 2024 Rp. 333.132.749,87

Penjelasan Koreksi Kurang

- a) Koreksi kurang merupakan akumulasi penyusutan mutasi kurang berupa Peralatan dan Mesin.

Penjelasan mutasi tambah kurang diatas dapat dilihat pada tabel lampiran 17 dan 18.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2024	2023
-----------	------	------

6. Aset Lain-Lain **902.962.490,00** **1.395.579.070,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain (Aset Tidak Bermanfaat) sampai dengan posisi 31 Desember 2024 dan 2023.

Dasar penilaian Aset Tidak Bermanfaat Rp. 902.962.490,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2024.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	1.395.579.070,00	0,00	492.616.580,00	902.962.490,00
Akm Penyusutan	(1.395.579.070,00)	492.616.580,00	0,00	(902.962.490,00)

Perkiraan	2024	2023
-----------	------	------

7. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (902.962.490,00) (1.395.579.070,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Aset Tidak Bermanfaat) posisi 31 Desember 2023. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	(1.395.579.070,00)	492.616.580,00	0,00	(902.962.490,00)

Uraian	Nilai
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2023 (NERACA)	(1.395.579.070,00)
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	0,00
• Reklas	492.616.580,00
• Beban Penyusutan Tahun 2024	0,00
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	0,00
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN ASET TIDAK BERMANFAAT PER 31 DES 24	902.962.490,00

Penjelasan

- Mutasi tambah rekalsifikasi asset tidak bermanfaat karena adanya usulan penghapusan senilai Rp492.616.580,00. Ke aset tetap peralatan dan mesin.

EKUITAS

Perkiraan	2024	2023
-----------	------	------

8. Ekuitas 557.588.543,93 716.726.943,80

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024. Ekuitas ini terdiri dari:

• Ekuitas	716.726.943,80
• Surplus/Defisit LO	(2.463.262.339,87)
• Perubahan SAL	2.304.123.940,00
• Surplus/Defisit LRA	(2.304.123.940,00)
• RK/PPKD	2.304.123.940,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

PENJELASAN SELISIH NERACA

Uraian	Manual	Sistem	Selisih
ASET	557,588,543.93	-1,776,979,796.07	
ASET LANCAR	6,387,640.00	-2,110,747,700.00	
Kas dan Setara Kas			
- Kas di Bendahara Penerima	-	-	
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-2,117,135,340.00	-2,117,135,340.00
- Setara Kas			
Beban Dibayar dimuka	3,889,640.00	3,889,640.00	-
Persediaan	2,498,000.00	2,498,000.00	-
Jumlah Aset Lancar	6,387,640.00	-2,110,747,700.00	
ASET TETAP	551,200,903.93	333,767,903.93	
Tanah	-	-	
Peralatan dan Mesin	3,993,823,050.00	3,776,390,050.00	217,433,000.00
Gedung dan Bangunan	-	-	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
Aset Tetap Lainnya			
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	
Akumulasi Penyusutan	-3,442,622,146.07	-3,442,622,146.07	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-3,442,622,146.07	-3,442,622,146.07	-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	
Akumulasi Penyusutan Jln, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	
Jumlah Aset Tetap (Netto)	551,200,903.93	333,767,903.93	
ASET LAINNYA	-	-	
Aset Tidak Berwujud			
Aset Tidak Berwujud	-	-	
Akm Amortisasi	-	-	
Aset Lain-Lain	-	-	
Aset Tidak Bermanfaat	902,962,490.00	902,962,490.00	-
Aset Dalam Penelusuran	-	-	
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	
Akm. Peny. aset tidak bermanfaat	-902,962,490.00	-902,962,490.00	-
Akm Peny Aset Dimanfaatkan Pihak Lain			
Jumlah Aset Lainnya	-	-	

JUMLAH ASET	557,588,543.93	- 1,776,979,796.07	
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	
Utang Belanja			
Utang Belanja Pegawai	-	-	
Utang Belanja Barang dan Jasa	-	-	
Utang Belanja Modal	-	-	
Utang Jangka Pendek Lainnya			
- Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	-	-	
EKUITAS	557,588,543.93	-1,776,979,796.07	
EKUITAS	557,588,543.93	-1,776,979,796.07	
Ekuitas	-1,746,535,396.07	-1,963,968,396.07	217,433,000.00
- Ekuitas	716,726,943.80		
- Surplus/Defisit - LO	-2,463,262,339.87		
Ekuitas SAL	-	-	
Perubahan SAL	2,304,123,940.00		
Surplus/Defisit LRA	-2,304,123,940.00		
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	2,304,123,940.00	186,988,600.00	2,117,135,340.00
R/K PPKD	2,304,123,940.00		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	557,588,543.93	-1,776,979,796.07	

Penjelasan selisih antara Neraca Manual dan Sistem

- Selisih Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. -2,117,135,340.00 yang merupakan jumlah dari SP2D UP + GU sebesar Rp. 2,117,302,675 dikurangi UYHD senilai Rp. 167,335.00
- Selisih Peralatan dan Mesin senilai 217,433,000.00 yang merupakan jumlah dari belanja modal tahun anggaran 2023 yang tidak masuk nilainya ke Neraca sistem 2023
- Selisih pada Ekuitas senilai belanja modal tahun anggaran 2023
- Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar 2,117,302,675 yang merupakan jumlah dari SP2D GU + UP dikurangi UYHD

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2024	2023
-----------	------	------

1) Beban Barang & Jasa	2.130.129.590,00	2.155.497.044,00
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Beban Pegawai	88.000.000,00	0,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	88.000.000,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	2.039.174.305,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	117.885.912,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.068.900,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	49.288.200,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.369.500,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.480.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	68.644.500,00	0,00
Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	153.590.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.020.000,00	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.550.000,00	0,00
Honorarium Rohaniwan	400.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	109.186.893,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	65.000.000,00	0,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	198.000.000,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.515.300,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.510.368,00	0,00

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	805.032,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN	3.949.164,00	0,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	15.558.560,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.500.000,00	0,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	88.039.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.000.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	8.760.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.140.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.057.762.976,00	0,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa- LO dapat dijelaskan sbb:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yg Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
Belanja Brg & Jasa	2.039.174.305,00	2.041.329.590,00	(2.502.118,75)

Belanja Modal	176.149.635,00	0,00	176.149.635,00
Beban Penyusutan & Amortisasi	0,00	333.132.749,87	(333.132.749,87)
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.304.123.940,00	2.463.262.339,87	(159.138.399,87)

Penjelasan selisih :

- a. Penjelasan Selisih Belanja Barang & jasa antara LRA dan LO berdasarkan Jurnal Penyesuaian pada semester 1 dan semester 2 sesuai lampiran 27 :

Objek Belanja LRA/LO	Semester I	Semester II	Jumlah
Belanja Jasa			
B. Premi Asuransi	7.876.595,00	-7.779.280,00	97.315,00
Belanja Barang			
B. Persediaan	-4.750.600,00	2.498.000,00	-2.252.600,00
Jumlah	3.125.995,00	-5.281.280,00	-2.155.285,00

Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Perkiraan	2024	2023
-----------	------	------

2) Beban Penyusutan dan Amortisasi **333.132.749,87** **472.916.566,20**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2024 dan Tahun 2023. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	333.132.749,87	0,00
• Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
• Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.

Sedangkan Daftar Jurnal Penyesuaian yang dibuat oleh SKPD untuk Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 28.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2024
1. Ekuitas Awal	716.726.943,80
2. Koreksi Ekuitas	0,00
3. RK PPKD	2.304.123.940,00
4. Surplus/Defisit LO	(2.463.262.339,87)
5. Ekuitas Akhir	557.588.543,93

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 716.726.943,80 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2023.
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 2.463.262.339,87 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2024
3. RK PPKD sebesar Rp. 2.304.123.940,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2024 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 557.588.543,93 adalah saldo Ekuitas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024.

a. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yg Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
Belanja Brg & Jasa	2.039.174.305,00	2.041.329.590,00	(2.502.118,75)
Belanja Modal	176.149.635,00	0,00	176.149.635,00
Beban Penyusutan & Amortisasi	0,00	333.132.749,87	(333.132.749,87)
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.304.123.940,00	2.463.262.339,87	(159.138.399,87)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Semangat otonomi daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditandainya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana dalam konteks peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu lebih ditingkatkan dengan memfokuskan perhatian kepada aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan seluas-luasnya kewenangan kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sasaran khusus yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut diatas adalah pemberian pelayanan publik secara prima dengan memperkuat pemerintahan lokal sebagai basis otonomi daerah. Pelayanan publik secara prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukannya karena cepat, mudah dan tepat serta dengan biaya yang jelas dan terjangkau, oleh sebab itu pemberian pelayanan harus relatif dekat dengan masyarakat yang memerlukannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjuti peraturan yang berlaku dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diikuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat .

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maka terbentuklah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat.

1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebelumnya bernama Biro Pengelolaan Aset Daerah yang berada pada unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan merupakan penggabungan dari Bagian Perlengkapan pada Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat dan Bidang Aset pada DPKD Provinsi Sumatera Barat, mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah Pemprov Sumatera Barat.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Sekretariat Daerah dalam menunjang tugas-tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Biro ini dipimpin oleh Kepala Biro yang berkedudukan di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan fungsi antara lain penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan, pembinaan, dan pengelolaan barang milik daerah, serta pengadaan barang dan jasa; penyelenggaraan perencanaan, pembinaan, dan pengelolaan barang milik daerah, serta pengadaan barang dan jasa; penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah, serta pengadaan barang dan jasa.

2. Struktur Organisasi

Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian dan 8 (delapan) orang fungsional sub Subtansi sebagai berikut ;

1. **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pembinaan barang milik daerah, serta pengelolaan penatausahaan biro. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Bina Sarana terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sub Kegiatan Perencanaan Pengadaan dan Barang Milik Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.
2. **Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi; dan
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. **Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;;
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan ;
 - c. Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Visi Dan Misi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

“ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa ”

Dengan menetapkan visi ini diharapkan apa yang menjadi visi dan misi dari Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 dapat secara optimal diwujudkan.

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dapat terlaksana untuk mewujudkan visi. Sehingga hal yang masih bersifat abstrak dapat lebih nyata terlihat pada misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya realisasi dan Akuntabilitas paket Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Dokumen Perencanaan;
2. Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ;
3. Meningkatnya tingkat Kematangan UKPBJ;

4. Strategi

Sebagai implementasi dari pernyataan visi dan misi diatas yang akan dicapai atau dihasilkan maka dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dengan diformulasikan tujuan ini, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat secara tepat dan tetap mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi atau mewujudkan visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Disamping itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mengukur sampai sejauhmana tingkat pencapaian visi dan misi mengingat tujuan tersebut dirumuskan berdasarkan visi dan misi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Mewujudkan tertib administrasi Pengadaan barang dan jasa;
- c. Mewujudkan tertib pengelolaan Barang dan Jasa;
- d. Mewujudkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Pencapaian tujuan secara umum merupakan tanggung jawab masing-masing bagian yang dilaksanakan secara utuh dan terpadu dengan sinkronisasi program kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip koordinasi, legalitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Sedangkan penetapan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun dalam kurun waktu lima tahun.

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan manajemen aparatur;
2. Terwujudnya tertib pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan Barang dan Jasa.

5. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, kebijakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
3. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd;
4. Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah;
5. Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
6. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD;
7. Terlaksananya Pengamanan Barang milik daerah SKPD;
8. Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
9. Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
10. Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor;
11. Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
12. Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
13. Terlaksananya pengadaan mebel;
14. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
15. Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat;
16. Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
17. Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
18. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
19. Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
20. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
21. Terlaksananya pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa;
22. Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
23. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
24. Terlaksananya pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik;
25. Terlaksananya pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
26. Terlaksananya pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
27. Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa;
28. Terlaksananya pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa;
29. Terlaksananya pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;

6. PROGRAM

Program Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ;
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN PER 31 Desember 2024

Gol.	Ruang	Nama
IV	C	1. David Yudia Putra, S.Sos,M.Si
	B	1. Andre Setiawan, S.STP.,MPA
	A	1. Andrizky, S.T.,M.T
		2. Harry Fitriadi, M.T
		3. Rosi Meilef Deritra, S.T
		4. Rina Andayani, S.STP.,M.M
		5. Cerry M., S.T.,M.M
		6. Desi Triana, S.Pd,M.Pd
III	D	1. Irla Erdina Sari, S.T
		2. Arif Nurman Florisa, S.T,M.T
		3. Rini Amelia Sari, S.T.,M.T
		4. Amrizal, S.P
		5. Aan Efriyandi, S.ST
		6. Erfan Zulyandra, SKM
		7. Irpandri Candra, S.Sos
		8. Roni Yohandi, S.T
		9. Al Azwir, S.ST
		10. Widya Kasuma, S.T.,M.T
		11. Effi Warni, S.T
		12. Zuriyatma, S.H
		13. Yanes Boy, A.Md
		14. Noveardi Saipunir, S.E
		15. Adri, S.Sos
		16. April Diwan, S.Sos
		17. Rostina, S.Pd
		18. Abdul Hamid, S.T
		19. Fitra Agung, SS
		20. Heldi Armen, S.Sos
	C	1. Juliani Matondang, AMTE
		2. Ismi Nugraha Utama, S.STP
		3. Devi Triyanti Mukarto, S.E
		4. Zulkifli, SKM
	B	1. Muhammad Doni, S.T
		2. Titip Permata, S.T
		3. Buskas Ricel, S.Kep
		4. Denny Febryansyah, SE.,M.Si

		5. Ronald, SE.,M.M
		6. Septianda, S.T
		7. Harlia Susanti, S.Pd
		8. Heneti Rohati, S.Sos
		9. Jasrul, A.Md
		10. Syurya Masni, S.Ak
		11. Bennest, S.Sos
	A	1. Rustian Arbi, S.T
		2. Aner Yuweti, S.T
		3. Mukramin Hadi, S.T
		4. Euis Kusuma Ningrum, S.T
		5. Elwis Sartika, S.E
		6. Harianto Platono, S.Sos
		7. Mira Larissa, ST
		8. Dewi Sundari, ST
		9. Alina Fatria, ST
II	D	1. M. Alfiman Syahnur
		2. Emi Harmiati
	C	1. Gella Khanila, A.Md
		2. Suci Indah Yaseva. A.Md
		3. Rio Paer, A.Md
P. Kontrak		1. Rahmat Hidayat, S.T
		2. Hestu Febri Daniosa, S.Kom
		3. Yandri Kurnia Dasta
		4. Wahyu Fauzi Syahputra
		Jumlah : 60 Orang

Padang, Desember 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**PIH. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

ANDRE SETIAWAN, S.STP, MPA

Pembina Tk. I

NIP. 19810920 199912 1 001

**BAB VII
PENUTUP**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, membawa implikasi diperlukannya system pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien, dan efektif.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan Negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Penyusunan dan penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014, dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara rinci yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Padang, Desember 2024

**PIH. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

ANDRE SETIAWAN, S.STP, MPA

Pembina Tk. I

NIP. 19810920 199912 1 001

DAFTAR REALISASI SP2D, SPJ DAN SISA UYHD TAHUN 2024
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	TOTAL SP2D GU	1,829,552,675.00
2	TOTAL SP2D LS	198,000,000.00
3	TOTAL SP2D TU	-
4	JUMLAH SP2D (JUMLAH 1+2+3)	2,027,552,675.00
5	SPJ UYHD / GU NIHIL	287,582,665.00
6	BELANJA KOTOR (JUMLAH 4+5)	2,315,135,340.00
7	TOTAL CP GU	11,011,400.00
8	TOTAL CP LS	-
9	TOTAL CP Tindak Lanjut BPK	
10	TOTAL CP (JUMLAH 7+8+9)	11,011,400.00
11	BELANJA BERSIH (SALDO 6-10)	2,304,123,940.00
12	SP2D UP	287,750,000.00
	Diterima tgl :	
	- Tgl 5 Februari 2024	287,750,000.00
13	SPJ UYHD/GU NIHIL	287,582,665.00
14	SISA UYHD	
	Penyetoran Sisa UYHD :	
	- Tgl 31 Desember 2023	167,335.00
		167,335.00

Padang, 31 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
Pembina Tk.I
NIP.19810920 199912 1 001

DAFTAR REKAPITULASI PENDAPATAN LRA TAHUN 2023

NO	BULAN	JENIS PENDAPATAN			JUMLAH
		PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	
1	JANUARI	-	-	-	-
2	FEBRUARI	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-
4	APRIL	-	-	-	-
5	MEI	N	H	L	-
6	JUNI	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-
8	AGUSTUS	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-	-
11	NOVEMBER	-	-	-	-
12	DESEMBER	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-

Padang, 31 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
 Pembina Tk.I
 NIP.19810920 199912 1 001

**DAFTAR PENYETORAN KEMBALI BELANJA (CONTRA POST BELANJA) BERDASARKAN GU/TU/LS
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN / OBJEK BELANJA	GU (Rp)	TU (RP)	LS (RP)	JUMLAH (Rp)
1	Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa/Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,536,600.00			
2	Sub Kegiatan Pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa/Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,662,845.00			
3	Sub Kegiatan Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa/Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	617,400.00			
4	Sub Kegiatan Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa/Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,325,355.00			
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa/Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,869,200.00			
		11,011,400.00	-	-	-

Padang, 31 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
Pembina Tk.I
NIP.19810920 199912 1 001

**DAFTAR PENYETORAN KEMBALI BELANJA (CONTRA POST BELANJA) BERDASARKAN JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN/OBJEK BELANJA	B. PEGAWAI (BTL)	B. PEGAWAI (LANGSUNG)	B. BRG & JASA	BELANJA MODAL				
					TANAH	P & M	GDG & BANGUNAN	JLN,IRIGASI & JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA
1	Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa/Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			3,536,600.00					
2	Sub Kegiatan Pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa/Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			1,662,845.00					
3	Sub Kegiatan Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa/Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			617,400.00					
4	Sub Kegiatan Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa/Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			2,325,355.00					
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa/Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			2,869,200.00					
		-	-	11,011,400.00	-	-	-	-	-

Padang, 31 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
Pembina Tk.I
NIP.19810920 199912 1 001

DAFTAR PIUTANG PAJAK & PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PIUTANG PER 31-Dec-24	UMUR PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG
			< 1 th 0.5%	1 - 2 th 10%	> 2 SD 5 TH 50%	> 5 th 100%	
		N	I	H	I	L	
	JUMLAH						

Padang, 31 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
 Pembina Tk.I
 NIP.19810920 199912 1 001

DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI DAN PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PIUTANG per 31 DES 2024	UMUR PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG
			< 1 bln	1-3 Bln	3-12 Bln	> 12 Bln	
			0.5%	10%	50%	100%	
	N I H I L						
	JUMLAH						

Padang, 31 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
 Pembina Tk.I
 NIP.19810920 199912 1 001

**DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DESEMBER 2024
(TIDAK TERMASUK SEWA RUMAH DINAS)**

NO	URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN LRA	JUMLAH PENDAPATAN LO	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		Rp	Rp	Rp
	N I H I L			
	JUMLAH	-	-	-

Padang, 31 Desember 2024
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
 Pembina Tk.I
 NIP.19810920 199912 1 001

DAFTAR BEBAN BAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH BELANJA LRA	JUMLAH BEBAN LO	JML BEBAN BAYAR DIMUKA	KETERANGAN: BEBAN PEGAWAI ATAU BEBAN BRG DAN JASA
		Rp	Rp	Rp	
	Premi Asuransi Barang Milik Daerah				
	- Premi Asuransi Kendaraan			3,889,640.00	
	JUMLAH			3,889,640.00	

Padang, 31 Desember 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

**ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA**

Pembina Tk.I

NIP.19810920 199912 1 001

DAFTAR PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK TAHUN 2024

NO	BULAN	PENERIMAAN						PENYETORAN						SISA
		PPH Psi 21	PPH Psi 22	PPH Psi 23	PBB/PPH Psi 4/26	PPN	JUMLAH	PPH Psi 21	PPH Psi 22	PPH Psi 23	PBB/PPH Psi 4/26	PPN	JUMLAH	
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	25,000.00	410.98	337,516.22	-	2,455,833.44	2,818,760.64	25,000.00	410.98	337,516.22	-	2,455,833.44	2,818,760.64	-
3	Maret	3,205,000.00	97,632.92	79,200.00	-	715.98	3,382,548.90	3,205,000.00	97,632.92	79,200.00	-	715.98	3,382,548.90	-
4	April	25,000.00	458.69	336,087.93	-	2,765.27	364,311.89	25,000.00	458.69	336,087.93	-	2,765.27	364,311.89	-
5	Mei	612,500.00	586.48	128,000.00	-	835.90	741,922.38	612,500.00	586.48	128,000.00	-	835.90	741,922.38	-
6	Juni	3,627,500.00	158,541.00	417,800.00	-	1,047,675.00	5,251,516.00	3,627,500.00	158,541.00	417,800.00	-	1,047,675.00	5,251,516.00	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	1,485,000.00	156,891.00	396,500.00	-	1,150,541.00	3,188,932.00	1,485,000.00	156,891.00	396,500.00	-	1,150,541.00	3,188,932.00	-
9	September	3,230,000.00	756,722.00	555,953.00	-	6,648,295.00	11,190,970.00	3,230,000.00	756,722.00	555,953.00	-	6,648,295.00	11,190,970.00	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	November	25,000.00	213,176.00	837,463.00	-	1,908,157.10	2,983,796.10	25,000.00	213,176.00	837,463.00	-	1,908,157.10	2,983,796.10	-
12	Desember	50,000.00	1,202,161.00	567,770.00	-	9,290,541.00	11,110,472.00	50,000.00	1,202,161.00	567,770.00	-	9,290,541.00	11,110,472.00	-
	JUMLAH	12,285,000.00	2,586,580.07	3,656,290.15	-	22,505,359.69	41,033,229.91	12,285,000.00	2,586,580.07	3,656,290.15	-	22,505,359.69	41,033,229.91	-

Padang, 31 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
 Pembina Tk.I
 NIP.19810920 199912 1 001

DAFTAR PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2024

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	NILAI (Rp)			JUMLAH
					BARANG PAKAI HABIS	BAHAN MATERIAL	BARANG LAINNYA	
	Persediaan Bahan Komputer							788,000
1	Tinta Printer (Black Ink)	Kotak	2	98,500	197,000			
2	Tinta Printer (Yellow Ink)	Kotak	2	98,500	197,000			
3	Tinta Printer (Magenta Ink)	Kotak	2	98,500	197,000			
4	Tinta Printer (Cyan Ink)	Kotak	2	98,500	197,000			
	Persediaan Alat Tulis Kantor							1,492,000
1	Spring File	box	2	265,300	530,600			
2	Corrextion pen	kotak	1	35,200	35,200			
3	Stabilo	Kotak	1	94,700	94,700			
4	Binder clip no 107	Kotak	3	3,100	9,300			
5	Binder clip no 206	Kotak	3	17,100	51,300			
6	Pelubang Kertas	Buah	1	72,000	72,000			
7	Isi Staples no 10	Kotak	2	37,900	75,800			
6	Binder clip no 115	Kotak	3	195,000	585,000			
7	Binder clip no 200	Kotak	3	12,700	38,100			
	Persediaan Kertas dan Cover							218,000
4	Kertas HVS : A4	Rim	2	51,000	102,000			
5	Kertas HVS : F4	Rim	2	58,000	116,000			
JUMLAH								2,498,000.00

Padang, 31 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
Pembina Tk.I

NIP.19810920 199912 1 001

DAFTAR MUTASI ANTAR SKPD
 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 TAHUNAN TAHUN 2024

MUTASI TAMBAH/KURANG	JENIS	NO	URAIAN	NO DOKUMEN	TGL DOKUMEN	PANJANG/ LUAS	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH UNIT	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	KETERANGAN	PERIODE
SEMESTER I 2023														
MUTASI TAMBAH	TANAH													
MUTASI TAMBAH	PERALATAN DAN MESIN													
MUTASI TAMBAH	GEDUNG DAN BANGUNAN													
MUTASI TAMBAH	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN													
MUTASI TAMBAH	ASET TETAP LAINNYA													
MUTASI TAMBAH	ASET LAINNYA													
MUTASI KURANG	TANAH													
MUTASI KURANG	PERALATAN DAN MESIN													
MUTASI KURANG	PERALATAN DAN MESIN													
MUTASI KURANG	GEDUNG DAN BANGUNAN													
MUTASI KURANG	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN													
MUTASI KURANG	ASET TETAP LAINNYA													
MUTASI KURANG	ASET LAINNYA													
SEMESTER II 2023														
MUTASI TAMBAH	PERALATAN DAN MESIN													
MUTASI TAMBAH	PERALATAN DAN MESIN													
MUTASI TAMBAH	GEDUNG DAN BANGUNAN													
MUTASI TAMBAH	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN													
MUTASI TAMBAH	ASET TETAP LAINNYA													
MUTASI TAMBAH	ASET LAINNYA													
MUTASI KURANG	TANAH													
MUTASI KURANG	PERALATAN DAN MESIN													
MUTASI KURANG	PERALATAN DAN MESIN													
MUTASI KURANG	PERALATAN DAN MESIN													
MUTASI KURANG	PERALATAN DAN MESIN													
MUTASI KURANG	GEDUNG DAN BANGUNAN													
MUTASI KURANG	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN													
MUTASI KURANG	ASET TETAP LAINNYA													
MUTASI KURANG	ASET LAINNYA													
TOTAL MUTASI TAMBAH											-	-		
TOTAL MUTASI KURANG											-	-		

N I H I L

Padang, 31 Desember 2024
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA


ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
 Pembina Tk.I
 NIP.19810920 199912 1 001

**DAFTAR REKAPITULASI DAN MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA
TAHUN 2024**

No	Jenis Aset	Saldo Awal 2024	Mutasi Semester I 2024		Saldo per 30 Juni 2024	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2024	Mutasi Semester II 2024		Saldo per 31 Desember 2024	Saldo Akm Peny/Amortisasi per 31 Desember 2024	Nilai Buku per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang			Tambah	Kurang			
A	ASET TETAP										
1	TANAH										
2	PERALATAN & MESIN	3,325,056,835.00	536,016,580.00	-	3,861,073,415.00	2,616,872,816.20	132,749,635.00		3,993,823,050.00	3,442,622,146.07	551,200,903.93
3	GEDUNG & BANGUNAN									-	-
4	JALAN, IRIGASI, JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ASET TETAP LAINNYA									-	-
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-		-	-	-	-	-	-	-	-
B	ASET LAINNYA										
1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ASET TIDAK BERWUJUD	-	-		-				-	-	-
3	ASET LAIN-LAIN	1,395,579,070	-	492,616,580	902,962,490	1,395,579,070	-	-	902,962,490.00	902,962,490.00	-

Padang, 31 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA


ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
 Pembina Tk.I
 NIP.19810920 199912 1 001

DAFTAR REKAPITULASI NILAI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DES 2024	NILAI PADA SAAT NERACA AWAL TAHUN 2005	NILAI APPRAISAL	HARGA PEMBELIAN TH 2006 S/D 2024
A	TANAH	-	-	-	-
B	PERALATAN & MESIN	3,993,823,050.00	127,062,425.00	-	3,866,760,625.00
C	GEDUNG & BANGUNAN	-	-	-	-
D	JALAN,IRIGASI, JARINGAN	-	-	-	-
E	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-
F	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-
	JUMLAH	3,993,823,050.00	127,062,425.00	-	3,866,760,625.00

Padang, 31 Desember 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
 Pembina Tk.I
 NIP.19810920 199912 1 001

DAFTAR KIB F KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan PER 31 DESEMBER 2024

NO	Uraian Pekerjaan / Kegiatan	Nilai Kontrak	Tingkat Penyelesaian	Jangka Waktu Penyelesaian	Harga Perolehan sampai 31 Desember 2024	Nama KPA / PPTK	Ket
			N I H I L				
	JUMLAH	-	-	-	-		

Padang, 31 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
 Pembina Tk.I
 NIP.19810920 199912 1 001

DAFTAR REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2024
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

JENIS	No	Uraian	No, Tgl SP2D/Kuitansi	No, Tgl Kontrak	Nama Rekanan	Jk Waktu Pelaksanaan	No, Tgl BAST	Lokasi Barang	Panjang/Luas	Merk/Type	Jumlah Unit	Harga Satuan	Nilai Perolehan	Ket	Periode
PERALATAN & MESIN	1	Alat Studio Lainnya (Mic Wireless)			PT. Sinar Mulia Andaas Infocom		375/Bast/BPBJ-III/2024 Tanggal 30-04-2024	Ruang Rapat Aula LLI		Sound System Paket Baretone	1.00	Rp 8,400,000.00	Rp 8,400,000.00		Semester I
PERALATAN & MESIN	2	Tablet			PT. Sinar Mulia Andaas Infocom		397/Bast/BPBJ-III/2024 Tanggal 13-05-2024	1. Ruang Kabag Advokasi 2. Ruang Kabag PBJ		Samsung Galaxy Tab S9 5G	2.00	Rp 17,500,000.00	Rp 35,000,000.00		Semester I
PERALATAN & MESIN	3	Tablet			PT. Locom Mandiri Indonesia		561/Bast/BPBJ-III/2024 Tanggal 12-08-2024	Ruang Staf LPSE		Samsung A9 Plus	1.00	Rp 5,616,468.00	Rp 5,616,468.00		Semester II
PERALATAN & MESIN	4	Handphone			PT. Locom Mandiri Indonesia		562/Bast/BPBJ-III/2024 Tanggal 12-08-2024	Ruang Pelayanan LPSE		Samsung Galaxy A05	1.00	Rp 1,523,167.00	Rp 1,523,167.00		Semester II
PERALATAN & MESIN	5	Tablet			PT. Semangat Berkat Jaya		975/Bast/BPBJ-III/2024 Tanggal 28-11-2024	1. Ruang Staf LPSE 2. Ruang Kabag LPSE		Samsung Galaxy A05	2.00	Rp 10,750,000.00	Rp 21,500,000.00		Semester II
PERALATAN & MESIN	6	Alat Penghancur Kertas			PT. Prakarsa Karya Bersama		1014/Bast/BPBJ-III/2024 Tanggal 09-12-2024	1. Ruang Staf Advokasi 2. Ruang Staf PBJ		Krisbow S433	2.00	Rp 5,900,000.00	Rp 11,800,000.00		Semester II
PERALATAN & MESIN	7	Ac Split			PT. Prakarsa Karya Bersama		1012/Bast/BPBJ-III/2024 Tanggal 27-12-2024	1. Ruang Staf Advokasi 2. Ruang Kabiro		LG 1 PK	2.00	Rp 5,950,000.00	Rp 11,900,000.00		Semester II
PERALATAN & MESIN	8	Mebeleur			PT. Prakarsa Karya Bersama		1010/Bast/BPBJ-III/2024 Tanggal 27-12-2024	Ruang Staf Advokasi		Kursi Kantor Sandaran Tinggi Zilton	6.00	Rp 1,975,000.00	Rp 11,850,000.00		Semester II
PERALATAN & MESIN	9	Mebeleur			PT. Prakarsa Karya Bersama		1010/Bast/BPBJ-III/2024 Tanggal 27-12-2024	Ruang Staf Advokasi		Meja Kantor Informa Halley	6.00	Rp 2,135,000.00	Rp 12,810,000.00		Semester II
PERALATAN & MESIN	10	Lemari Arsip Metal			PT. Prakarsa Karya Bersama		1016/Bast/BPBJ-III/2024 Tanggal 27-12-2024	Ruang Staf Advokasi		Alba SC- 201	4.00	Rp 6,000,000.00	Rp 24,000,000.00		Semester II
PERALATAN & MESIN	11	Locker			PT. Prakarsa Karya Bersama		1016/Bast/BPBJ-III/2024 Tanggal 27-12-2024	1. Ruang Staf PB 2. Ruang Pembuktian PBJ		Alba LC- 505	3.00	Rp 4,000,000.00	Rp 12,000,000.00		Semester II
PERALATAN & MESIN	12	Printer			PT. Prakarsa Karya Bersama		1016/Bast/BPBJ-III/2024 Tanggal 27-12-2024	1. Ruang Staf Advokasi 2. Ruang Staf LPSE 3. Ruang Kabag PBJ		Epson L5290	5.00	Rp 3,950,000.00	Rp 19,750,000.00		Semester II
JUMLAH													Rp 176,149,635.00		

Padang, 31 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA

Pembina Tk.I

NIP.19810920 199912 1 001

DAFTAR BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISIR TAHUN 2024

NO	URAIAN	No, Tgl SP2D/ Kuitansi	No, Tgl Kontrak	Nama Rekanan	Merk/Type	Jumlah Unit	Harga Satuan	Total Harga	Ket.
			N I H I L						
	JUMLAH							-	

Padang, 31 Desember 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
Pembina Tk.I

NIP.19810920 199912 1 001

DAFTAR BELANJA BARANG DAN JASA YANG DIKAPITALISIR TAHUN 2024

No	URAIAN/DIKAPITALISIR KE JENIS ASET TETAP & ASET LAINNYA	Nomor/Tgl. SP2D/ Kuitansi	No.Tgl Kontrak	Nama Rekanan	Merk/Type	Jumlah/Unit	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	KE TANAH							
B	KE PERALATAN & MESIN							
C	KE GEDUNG & BANGUNAN							
D	KE JLN, IRIGASI & JARINGAN							
E	KE ASET TETAP LAINNYA							
F	KE ASET LAINNYA							
JUMLAH								-

N I H I L

Padang, 31 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
 Pembina Tk.I
 NIP.19810920 199912 1 001

**Register SP2D UP/GU/TU/LS
Tahun 2024
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**

No.	Tanggal	Nomor SPM	Nomor SP2D				Uraian	Jumlah SP2D (Rp)				
			UP	GU	TU	LS		UP	GU	TU	LS	
						Brg/Jasa					Belanja Modal	Brg/Jasa
1	5 Februari 2024	13.00/04.0/000010/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2024	13.00/04.0/000010/UP/4.01.0.0.0.0.0.00.01.0000/M/2/2024				Pembayaran Uang Persediaan (UP) Biro PBJ tahun 2024	287,750,000				
2	1 April 2024	13.00/04.0/000051/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024		13.00/04.0/000051/GU/4.01.0.0.0.0.00.01.0000/M/4/2024			Pembayaran GU1 Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat		240,594,573			
3	19 April 2024	13.00/04.0/000063/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024				13.00/04.0/000063/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	Belanja Sewa Colocation Server Untuk Bulan Januari sd Maret 2024					49,500,000
4	2 Mei 2024	13.00/03.0/000130/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024		13.00/04.0/000108/GU/4.01.0.0.0.0.00.01.0000/M/5/2024			Pembayaran GU2 Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat		199,928,150			
5	12 Juni 2024	13.00/03.0/000455/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024		13.00/04.0/000337/GU/4.01.0.0.0.0.00.01.0000/M/6/2024			Pembayaran Persediaan Ganti Uang (GU 3) Biro PBJ tahun 2024		276,669,991			
6	26 Juli 2024	13.00/03.0/000825/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024				13.00/04.0/000557/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	Belanja Sewa Colocation Server Untuk Bulan April sd Juni 2024					49,500,000
7	07 Agustus 2024	13.00/03.0/000882/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024		13.00/04.0/000625/GU/4.01.0.0.0.0.00.01.0000/M/8/2024			Pembayaran Persediaan Ganti Uang (GU 4) Biro PBJ tahun 2024		193,513,520			
8	02 September 2024	13.00/03.0/000953/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2024		13.00/04.0/000734/GU/4.01.0.0.0.0.00.01.0000/P2/9/2024			Pembayaran Persediaan Ganti Uang (GU 5) Biro PBJ tahun 2024		265,389,021			
9	30 September 2024	13.00/03.0/000980/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P2/9/2024		13.00/04.0/000756/GU/4.01.0.0.0.0.00.01.0000/P2/9/2024			Pembayaran Persediaan Ganti Uang (GU 6) Biro PBJ tahun 2024		203,035,931			
10	26 November 2024	13.00/03.0/001979/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024		13.00/04.0/001546/GU/4.01.0.0.0.0.00.01.0000/PR/11/2024			Pembayaran Persediaan Ganti Uang (GU 7) Biro PBJ tahun 2024		198,754,264			
11	29 November 2024	13.00/03.0/002008/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024		13.00/04.0/001556/GU/4.01.0.0.0.0.00.01.0000/PR/11/2024			Pembayaran Persediaan Ganti Uang (GU 8) Biro PBJ tahun 2024		251,667,225			
12	06 Desember 2024	13.00/03.0/002046/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024				13.00/04.0/001623/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Sewa Colocation Server Untuk Bulan Juli sd September 2024					49,500,000
13	24 Desember 2024	13.00/03.0/002277/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024				13.00/04.0/001763/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Belanja Sewa Colocation Server Untuk Bulan Oktober sd Desember 2024					49,500,000
JUMLAH								287,750,000	1,829,552,675	-	-	198,000,000
TOTAL								2,315,302,675				

Padang, 31 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA


ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
 Pembina Tk.I
 NIP.19810920 199912 1 001

DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN APBD DAN BLUD TAHUN 2024

NO	URAIAN	GABUNGAN			APBD			BLUD		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
A.	PENDAPATAN									
	Pendapatan Pajak daerah									
	Pendapatan Retribusi Daerah									
	Pendapatan Hasil PKD									
	Lain-Lain PAD Yang Sah									
B.	BELANJA									
1	BELANJA OPERASI									
	Belanja Pegawai									
	Belanja Barang									
		N	I	H	I	L				
2	BELANJA MODAL									
	Belanja Tanah									
	Belanja Peralatan & Mesin									
	Gedung & Bangunan									
	Belanja Jln, Irigasi, Jaringan									
	Belanja Aset Tetap Lainnya									
C.	SURPLUS / DEFISIT									
D.	SALDO KAS BLUD									
1	Saldo Awal per 1 Jan 2016									
2	Saldo Akhir per 31 Des 2016									

Padang, 31 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
 Pembina Tk.I
 NIP.19810920 199912 1 001

DAFTAR LAPORAN OPERASIONAL APBD DAN BLUD TAHUN 2024

NO	URAIAN	GABUNGAN		%	APBD		%	BLUD		%
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
A.	KEGIATAN OPERASIONAL									
	PENDAPATAN									
	Pendapatan Pajak daerah									
	Pendapatan Retribusi Daerah									
	Pendapatan Hasil PKD									
	Lain-Lain PAD Yang Sah									
B.	BELANJA									
1	BELANJA OPERASI									
	Belanja Pegawai									
	Belanja Barang									
2	BELANJA MODAL									
	Belanja Tanah									
	Belanja Peralatan & Mesin									
	Gedung & Bangunan									
	Belanja Jln, Irigasi, Jaringan									
	Belanja Aset Tetap Lainnya									
C.	SURPLUS / DEFISIT									
D.	SALDO KAS BLUD									
1	Saldo Awal per 1 Jan 2016									
2	Saldo Akhir per 31 Des 2016									

Padang, 31 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
Pembina Tk.I

NIP.19810920 199912 1 001

PENJELASAN PERBEDAAN LRA DAN LO TAHUN 2024

Uraian	LRA	LO	Selisih	Keterangan	
				selisih berasal dari pencatatan jurnal penyesuaian yang terdiri dari	
				Semester I	
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Pajak Daerah					
Pendapatan Hasil PKD				B. Premi Asuransi	(3,792,325.00)
Lain-lain PAD yang Sah				B. Premi Asuransi	11,668,920.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				Beban persediaan	(4,750,600.00)
				jumlah	3,125,995.00
				Semester II	
Belanja/Beban Pegawai	88,800,000.00	88,800,000.00	-		
Belanja /Beban Brg & jasa	2,039,174,305.00	2,041,329,590.00	(2,155,285.00)	B. Premi Asuransi	(7,779,280.00)
Belanja Modal	176,149,635.00		176,149,635.00	Beban persediaan	2,498,000.00
Beban Penyusutan & Amortisasi		333,132,749.87	(333,132,749.87)		
Beban Penyisihan Piutang			-		
Jumlah Belanja/Beban	2,304,123,940.00	2,463,262,339.87	(159,138,399.87)	jumlah	(5,281,280.00)
				Total I & II	(2,155,285.00)
				Berupa selisih pencatatan beban penyusutan Tahun 2024	(333,132,749.87)
Surplus / Defisit	(2,304,123,940.00)	(2,463,262,339.87)		Belanja Modal bukan komponen dari Laporan Operasional (LO), dan hanya terdapat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	176,149,635.00

Padang, 31 Desember 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



ANDRE SETIAWAN, S.STP.MPA
Pembina Tk.I
NIP.19810920 199912 1 001